



DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implikasi Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok bagi Hukum dan Teori Pembangunan di Indonesia

Fahrurrahman¹

¹Magister Hukum Universitas Indonesia, Indonesia, Fahrurrahman71@gmail.com

Corresponding Author: Fahrurrahman71@gmail.com¹

Abstract: *China's economic rise in the last two decades has demonstrated an extraordinary transformation that has had a significant impact on the global economic and political order. This paper explores China's policies and legal systems that contribute to the country's economic growth, as well as their impact on Indonesia as a developing country. With a normative juridical approach, this research analyzes China's economy, such as the Open Door Policy and the Belt and Road Initiative (BRI), which open up opportunities for investment and international cooperation. This study also discusses the impact of China's economic policies on infrastructure development, natural resource downstreaming, and digital economic growth in Indonesia, while highlighting emerging challenges, including economic dependency and environmental issues. This research concludes that although Chinese investment offers significant benefits for Indonesia, management strategies are needed to ensure sustainability, inclusiveness and national interests are maintained.*

Keywords: *Chinese Economic Policy, Indonesian Economy, Economic Development*

Abstrak: Kebangkitan ekonomi Tiongkok dalam dua dekade terakhir menunjukkan transformasi luar biasa yang membawa dampak signifikan pada tata ekonomi dan politik global. Makalah ini mengeksplorasi kebijakan dan sistem hukum Tiongkok yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara tersebut, serta dampaknya terhadap Indonesia sebagai negara berkembang. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis reformasi ekonomi Tiongkok, seperti Kebijakan Pintu Terbuka dan Belt and Road Initiative (BRI), yang membuka peluang investasi dan kerja sama internasional. Studi ini juga membahas dampak kebijakan ekonomi Tiongkok terhadap pembangunan infrastruktur, hilirisasi sumber daya alam, dan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, sambil menyoroti tantangan yang muncul, termasuk ketergantungan ekonomi dan isu lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun investasi Tiongkok menawarkan manfaat signifikan bagi Indonesia, diperlukan pengelolaan strategis untuk memastikan keberlanjutan, inklusivitas, dan kepentingan nasional tetap terjaga.

Kata Kunci: *Kebijakan Ekonomi Tiongkok, Ekonomi Indonesia, Pembangunan Ekonomi*

PENDAHULUAN

Membicarakan suatu negara dengan sendirinya harus juga membicarakan tentang strategi dan kebijakannya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tiada suatu negara tanpa tujuan dan tidak ada tujuan besar yang ingin dicapai tanpa dukungan dan partisipasi besar dari segenap elemen bangsa. Demikian juga yang sedang terjadi di Negara Tiongkok. Pertumbuhan dan kemajuan Tiongkok didukung oleh seluruh masyarakat Tiongkok, baik yang yang menghuni wilayah Tiongkok maupun masyarakat Tiongkok yang tersebar di seluruh pelosok dunia (diaspora Tiongkok). Republik Rakyat Tiongkok atau Tiongkok adalah negara yang berada di Asia Timur yang berdiri pada 1 Oktober 1949 adalah sebuah negara yang menganut paham komunis, sehingga segala kebijakannya harus selaras dengan kebijakan Partai Komunis Cina (PKC). PKC merupakan sebuah partai di Cina sekaligus yang memiliki peran besar dalam menentukan segala arah kebijakan pemerintahan Cina. Cina, setelah masa kemerdekaannya pada tahun 1949 merupakan negara dengan sistem ekonomi sangat tertutup. Hal ini disebabkan oleh kepemimpinan Presiden Mao Zedong yang sangat anti-kapitalisme sehingga tidak ada aliran investasi dari negara lain.

Setelah melewati fase reformasi pemerintahan yang dimulai dengan runtuhnya Dinasti Qing pada tahun 1911, kemudian deklarasi Negara Republik Tiongkok pada tahun 1912 oleh Sun Yat Sen, dan pembentukan Negara Republik Rakyat Tiongkok oleh Mao Zedong pada tahun 1949, Tiongkok telah menjadi negara dengan pengalaman tata negara yang luar biasa. Di mana, Tiongkok telah menjadi salah satu aktor utama di dunia internasional yang bisa dijadikan contoh oleh negara-negara berkembang, terutama dalam hal model perekonomian dan industrinya yang berkembang pesat dan mendominasi hampir seluruh dunia (Fadilah dan Kumajaya, 2017). Tiongkok memiliki ekonomi paling besar dan paling kompleks di dunia selama lebih dari dua ribu tahun, beserta dengan beberapa masa kejayaan dan kejatuhan (Dahlman, 2024). Sejak diperkenalkannya reformasi ekonomi tahun 1978, Tiongkok menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Per 2013, negara ini menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia berdasarkan total nominal GDP dan PPP, serta menjadi eksportir terbesar di dunia.

Negara Tiongkok telah dipandang sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam kurun waktu dua dekade terakhir. Ekspansi ekonomi Tiongkok di sejumlah kawasan melalui agenda kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) menunjukkan bahwa negara itu mulai bergerak sebagai kekuatan baru (new emerging power) dan sekaligus menegaskan kebangkitan dalam kontestasi ekonomi politik global. Buku berjudul *Tiongkok's Asian Dream: Empire Building along the New Silk Road*, yang ditulis oleh Tom Miller merupakan buku yang mendeskripsikan bagaimana Cina membangun ambisinya untuk menjadi kekuatan dunia, di samping Amerika Serikat. Miller menuliskan bagaimana Cina membangun pengaruhnya melalui "Jalur Sutra Baru" yang ditandai dengan proyek Belt and Road Initiative (BRI), sebuah proyek infrastruktur sangat besar. Melalui proyek ini, Tiongkok akan membangun jalan raya, jalan kereta, jalur pipa, pabrik, pelabuhan melintasi Asia, Eropa, Timur Tengah dan Afrika. Selain itu Miller juga membahas satu per satu bagaimana Cina berusaha mencari partner, aliansi dan pengaruh demi mewujudkan "Chinese Dream". Proses kebangkitan Tiongkok selama lebih dari dua dekade terakhir dapat dikatakan berlangsung cukup dramatis. Diawali dari reformasi 1978, mengadopsi sistem ekonomi kapitalis, membuka diri terhadap liberalisasi ekonomi, merumuskan jalur kerjasama melalui BRI sampai dengan terjadinya peristiwa perang dagang dengan Amerika Serikat. Melalui sejumlah parameter yang meliputi ekonomi, teknologi, militer, dan ilmu pengetahuan membuat posisi Tiongkok semakin disejajarkan dengan Amerika Serikat. Kebangkitan dramatis tersebut menarik untuk dikaji (Suharman dan Sugiarto, 2021).

Pada awal abad ke-21, dunia memang dikejutkan dengan kebangkitan Cina yang menjadi pesaing dari Amerika Serikat di Asia Pasifik. Setelah hampir dua ratus tahun

terpuruk akibat ekspansi imperialisme politik dan ekonomi Barat, Cina kemudian bangkit kembali menjadi kekuatan ekonomi dunia. Belajar dari sejarah, Cina kemudian bangkit menjadi negara kuat dan disegani pada awal abad ke-21. Karena tidak ingin sejarah pahit tersebut terulang, Tiongkok terus memperkuat ekonomi dan militernya. Dalam bidang diplomasi, Cina juga tidak lagi menjadi negara yang low profile. Bahkan setelah Xi Jinping menjabat sebagai presiden, Cina melakukan kebijakan politik luar negeri yang proaktif di kawasan Asia. Kebangkitan Tiongkok merupakan rangkaian proses yang banyak dipengaruhi oleh berbagai kebijakan politik dan ekonomi setiap pemimpin negaranya. Selain itu, romantika kejayaan masa lalu menambah inspirasi bagi kebangkitan Tiongkok dalam mewarnai percaturan politik dunia sekarang. Bahkan bisa lebih jauh dikatakan, kebangkitan Tiongkok hari ini telah mengimbangi posisi dunia yang selama ini cenderung didominasi oleh AS dan negara-negara barat.

Selain fokus pada pembangunan ekonomi dalam negeri, Tiongkok juga membangun kekuatan eksternal dengan negara-negara lain melalui berbagai diplomasi dan hubungan luar negeri Tiongkok. Bagi Tiongkok, akan semakin mudah melakukan ekspansi hubungan luar negeri dengan negara-negara di Asia. Hal itu dipengaruhi oleh kemampuan Tiongkok dalam image building sebagai negara yang memiliki kekuatan untuk rising power dengan menerapkan new security concept dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Maksud dari new security concept yang digunakan Tiongkok adalah untuk memproyeksikan diri tidak hanya sebagai tetangga yang baik bagi negara lain, tetapi juga sebagai mitra yang baik (Alunaza *et al*, 2021). Selain rising power, julukan yang melekat pada Tiongkok sebagai Peaceful Rise juga menggambarkan situasi dan pengaruh yang dibawa oleh Tiongkok dalam kerangka hubungan luar negerinya dengan negara-negara di dunia. Tiongkok dijelaskan mampu mendekati negara lain yang didukung dengan modal dari sektor ekonomi yang sangat besar, teknologi yang begitu maju, dan sumber daya manusia yang sangat berpengaruh. Tiongkok juga dikenal sebagai negara memiliki kekuatan engagement sebagai interaksi strategis untuk mempengaruhi perilaku politik suatu negara melalui comprehensive establishment dan peningkatan kontak hubungan dengan negara-negara target di berbagai bidang seperti diplomatik, militer, dan ekonomi yang dilakukan Tiongkok terdapat Amerika Latin, Afrika, dan negara-negara Asia (Musfiroh & Alunaza, 2020).

Politik luar negeri Tiongkok menggunakan kebijakan damai yang independen. Kebijakan itu bertujuan untuk menciptakan kemandirian dan mempertahankan kedaulatan negara. Tiongkok berupaya meningkatkan perannya di dunia internasional dengan mendorong modernisasi, keterbukaan dan perubahan. Mengenai pembangunan tata ekonomi dan politik dunia yang baru, Tiongkok berharap dunia internasional bisa damai dalam jangka waktu panjang yang dapat mendukung pembangunan semua negara di dunia. Hal ini sebagaimana yang sering disampaikan oleh Presiden Xi Jinping, bahwa sangat penting bagi Tiongkok untuk mengambil tanggung jawab sebagai negara besar. Tiongkok perlu mengadvokasi semangat kemerdekaan, memperjuangkan pembangunan yang damai dan mempromosikan stabilitas dan kemakmuran global. Kebijakan luar negeri Tiongkok dalam bidang ekonomi tentunya dirasakan juga oleh Indonesia sebagai negara berkembang yang sudah lama membangun kerjasama dengan Tiongkok. Salah satu strategi kebijakan pembangunan ekonomi yang diusung oleh Presiden Xi Jinping adalah One Belt One Road (OBOR), yang kemudian berkembang menjadi Belt Road Initiative (BRI). Strategi ini terinspirasi dari jalur perdagangan tradisional yang dikenal sebagai Jalur Sutra (Silk Road) di masa lalu (Cipto, 2018).

Indonesia sebagai negara berkembang, adanya politik luar negeri Tiongkok yang bersifat inklusif dengan semangat saling membantu antar negara, tentunya akan membantu Indonesia dalam mendukung pembangunan ekonomi. Hubungan Indonesia dengan Tiongkok bukan lah hubungan yang dibangun beberapa dekade terakhir, melainkan hubungan yang sudah berkembang sejak Presiden Indonesia pertama, yakni Bapak Presiden Ir. Soekarno.

Hubungan diplomatik dua negara ini berkembang dengan perubahan zaman dan pemerintahan yang masih harmonis dan jauh dari perselisihan. Sejak saat itu, hubungan diplomatik dua negara telah menyepakati berbagai bidang kerjasama. Adanya kebijakan ekonomi luar negeri yang dibawa oleh Tiongkok memberikan harapan bagi Indonesia untuk menuju negara yang lebih maju dengan hubungan yang saling menguntungkan. Bagi Indonesia, bergaul dan membangun kerjasama dengan negara pun adalah perintah konstitusi dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, termasuk membangun hubungan kerjasama ekonomi dengan Tiongkok. Tiongkok telah membuktikan beberapa dekade terakhir, banyak hal-hal besar dan hebat yang telah dicapai dalam bidang ekonomi, pembangunan, kemajuan teknologi dan lain sebagainya yang dapat dipelajari oleh bangsa Indonesia. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan Indonesia baik di tingkat domestik maupun internasional. Namun, Indonesia perlu memperlakukan kerja sama ini dengan cermat dan tetap hati-hati dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif yang tertulis atau disebut juga penelitian hukum normatif kepustakaan (Mamudji, 2005). Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari kepustakaan (Soekanto dan Sri, 2019). Data sekunder ini dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soekanto, 1986). Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa UUD NRI 1945 atau Konstitusi Negara Tiongkok dan Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan judul penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah berupa hasil karya dalam bentuk buku, artikel, penelitian-penelitian, skripsi, tesis, disertasi, kamus-kamus hukum dan jurnal hukum serta sumber internet. yang mendukung bahan hukum primer terkait dengan judul penelitian ini. Adapun bahan hukum tersier yang hendak digunakan adalah dapat berupa kamus istilah hukum seperti kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan Black's Law Dictionary.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Kebijakan dan Sistem Hukum Negara Tiongkok dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi

Pengaruh Kebijakan dalam Pertumbuhan Ekonomi Negara Tiongkok

Ada beberapa kebijakan yang kami *highlight* dalam menggambarkan pertumbuhan ekonomi dan pengaruh Tiongkok yang sangat besar.

Pertama, Kebijakan Pintu Terbuka atau Keterbukaan. Periode pada tahun 1978, Deng Xiaoping berkuasa dan memulai serangkaian reformasi yang melakukan liberalisasi ekonomi. Ini memungkinkan lebih banyak perusahaan swasta dan investasi asing. Akibatnya, ekonomi Cina mulai tumbuh pesat. Reformasi telah membawa perekonomian Tiongkok yang dulu terisolasi menjadi lebih terbuka. Semenjak saat itu ekonomi Tiongkok tumbuh 10% rata-rata per tahun. Reformasi dan kebijakan pintu terbuka Tiongkok dimulai dengan penerapan strategi pembangunan ekonomi baru pada akhir tahun 1978. Pergeseran ke kebijakan ekonomi pintu terbuka mengantarkan pada periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada paruh pertama tahun 1980-an. Tiongkok kembali membanggakan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang cepat disertai dengan peningkatan PDB per kapita. Dalam kebijakan terbuka yang disebut Deng Xiaoping sebagai “pintu terbuka”, perdagangan luar negeri dan investasi asing diusahakan untuk ditingkatkan. Ekonomi Tiongkok pada dasarnya adalah ekonomi tertutup sebelum reformasi ekonomi. Pada tahun 1978, total volume

perdagangan luar Negerinya, atau jumlah nilai ekspor dan impornya, hanya sebesar 7% dari pendapatan nasionalnya.

Kebijakan pintu terbuka Deng Xiaoping mendorong Tiongkok untuk membuka diri terhadap impor asing dan promosi ekspor. Pada tahun 1987, volume perdagangan luar negeri meningkat menjadi 25 % dan pada tahun 1998 menjadi 37 % dari produk domestik bruto (Khaldun *et al.*, 2023). Kebijakan pintu terbuka yang mengandung visi reformasi ekonomi menjadi bagian terpenting dalam menjelaskan proses transformasi kebijakan luar negeri Tiongkok melalui nafas ekonomi. Dalam menerobos ketertinggalannya dalam konfigurasi internasional, para pemimpin reformis Tiongkok bersepakat untuk melakukan perbaikan pola kebijakan dengan hirau pada agenda modernisme. Keputusannya terlihat semenjak Deng Xiaoping melakukan pembukaan hubungan kerja sama dengan kawasan Eropa yang ditandai dengan lawatan ke Perancis tahun 1975. Kemudian tahun 1978 melakukan normalisasi hubungan Tiongkok dengan Jepang yang diiringi dengan bentuk diplomasi ekonomi dan kebudayaan. Selain itu, Deng Xiaoping lantas membentuk terobosan terpenting dengan upaya normalisasi hubungan Tiongkok dengan AS pada awal 1979. Proses ini pertama-tama diisi dengan pertemuan kenegaraan hingga pertemuan para pemimpin-pemimpin bisnis mereka satu sama lain.

Kedua, Kebijakan Western Development Strategy (WDS). Kebijakan ini berfokus pada pemerataan pembangunan wilayah Tiongkok bagian barat yang mengalami ketimpangan. Secara umum, WDS merupakan strategi yang diciptakan untuk membuat berbagai kebijakan yang telah dan akan dikeluarkan pemerintah menjadi lebih terstruktur. Pada dasarnya strategi ini ditujukan untuk merevitalisasi pusat-pusat industri di daerah barat Tiongkok yang sebelumnya pernah dibangun di era kepemimpinan Mao Zedong. Komponen utama strategi ini di antaranya; pembangunan infrastruktur dan sistem transportasi, jaringan telekomunikasi, dan pembangkit listrik; kebijakan-kebijakan khusus di sektor energi, pertambangan, pertanian dan pariwisata; peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan; serta kebijakan-kebijakan lain untuk menarik investasi asing seperti keringanan pajak dan perizinan (Wibawa dan Puguh, 2019). Untuk merealisasikan strategi WDS, pada bulan Oktober tahun 2000 pemerintah Tiongkok menerbitkan dokumen *Notice of the State Council on Implementing Several Policies and Measures for the Western Development Strategy*. Dokumen ini berisi panduan pelaksanaan WDS. Setelah itu, pada bulan September tahun 2001 pemerintah kembali mengeluarkan sejumlah kebijakan implementatif yang terangkum dalam *Notice of the Opinions of the State Council Western Development Office on Implementing Policies and Measures for the Western Development Strategy*. Melalui kedua dokumen tersebut secara keseluruhan pemerintah telah menerbitkan 70 kebijakan dalam penerapan dan pengukuran keberhasilan WDS. Kebijakan ini telah memberikan peluang bagi masyarakat di daerah-daerah tertinggal untuk dapat turut serta menikmati buah dari pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang selama ini belum mereka rasakan. Kesejahteraan yang merata (*common prosperity*) telah menggeser slogan *getting rich first* sebagai tujuan pembangunan negara.

Ketiga, Kebijakan Harmonious Society/World. Kebijakan ini dikenalkan sebagai konsep oleh Presiden Hu Jintao untuk menggambarkan bentuk perkembangan sosial-ekonomi Tiongkok di masa depan. Konsep ini muncul dari dampak perkembangan perekonomian Tiongkok yang sangat cepat sehingga menimbulkan kesenjangan sosial. Pada dasarnya, konsep “harmonisasi” berakar dari ajaran Konfusianisme, yang mengatur hubungan tidak hanya keluarga tetapi juga pemerintah dan orang yang diperintah. Dalam mencapai keharmonisan sosial, bukan berarti tidak akan ada konflik sebaliknya konflik ini cenderung lebih mengutamakan perintah dan stabilitas yang memungkinkan untuk meminimalisasi perbedaan sosial dan konflik. Seiring dengan

konsep *Harmonious Society* yang dicanangkan oleh Presiden Hu Jintao, pemimpin Tiongkok ini juga ingin menyebarkan bentuk diplomasi Tiongkok yang baru yang selaras dengan konsep harmonisasi. Bentuk politik luar negeri Tiongkok pada masa Hu Jintao pada dasarnya memang tidak jauh dari konsep *Harmonious Society*, yaitu *Harmonious World*. Secara keseluruhan, Tiongkok mengubah bentuk diplomasinya. Namun, konsep ini tidak lagi digunakan pada masa pemerintahan Presiden Xi Jinping. Xi Jinping menggantinya dengan konsep "*Tiongkok Dream*". Konsep "*Tiongkok Dream*" dibagi menjadi empat tujuan, yakni: 1) *Strong Tiongkok*; 2) *Civilized Tiongkok*; 3) *Harmonious Tiongkok*; dan 4) *Beautiful Tiongkok*. Untuk mencapai tujuan tersebut, Presiden Xi Jinping menggunakan konsep kekuatan diplomasi dengan karakteristik Tiongkok.

Sistem Hukum Negara Tiongkok dan Perlakuan Terhadap Investor

Seiring berjalannya waktu, struktur perjanjian investasi asing Tiongkok semakin menyerupai perjanjian yang ditandatangani oleh negara-negara industri Barat. Hal ini mencerminkan peningkatan harmonisasi antara Tiongkok dan praktik internasional, sekaligus menegaskan bahwa meskipun ada penyesuaian dengan standar global, Tiongkok tetap mempertahankan pendekatan pragmatis sesuai dengan kebijakan ekonomi nasionalnya.

Pada 15 Maret 2019, Tiongkok menerapkan Undang-Undang Investasi Asing yang memperkenalkan kerangka regulasi untuk mengatur masuknya investasi asing, termasuk penerapan daftar negatif investasi (Negative List). Daftar ini mencantumkan sektor-sektor tertentu yang dibatasi atau dilarang untuk investasi asing, dengan tujuan melindungi kepentingan nasional sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investor. Negative List tahun 2021 mencakup berbagai sektor strategis, seperti pertanian, pertambangan, manufaktur, energi, perdagangan, transportasi, teknologi informasi, layanan sewa, riset dan teknologi, serta kesehatan dan sosial. Dengan menetapkan daftar ini, Tiongkok memberikan panduan yang jelas mengenai sektor-sektor yang terbuka untuk investasi, serta sektor yang memerlukan izin khusus atau sepenuhnya tertutup.

Lebih lanjut, Pasal 5 Undang-Undang Investasi Asing menjelaskan bahwa Tiongkok memberikan jaminan hukum kepada investor asing dalam hal terjadi ekspropriasi. Undang-undang ini menyatakan bahwa jika pemerintah melakukan ekspropriasi terhadap aset asing, maka kompensasi penuh harus diberikan kepada investor. Ketentuan ini bertujuan untuk menghapus kekhawatiran investor asing yang menganggap ekspropriasi sebagai salah satu ancaman terbesar terhadap keamanan investasinya.

Jaminan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan investor asing tetapi juga mencerminkan komitmen Tiongkok untuk mengikuti standar internasional dalam perlindungan investasi. Dengan memberikan kepastian hukum yang kuat, Tiongkok berusaha untuk menarik lebih banyak investasi asing langsung (FDI), sekaligus menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki kebijakan yang mendukung stabilitas dan kelangsungan investasi.

Perlakuan Tiongkok terhadap investor tersebut menunjukkan upaya Tiongkok untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih transparan sekaligus tetap menjaga kendali negara atas sektor-sektor yang dianggap penting bagi keamanan dan stabilitas ekonomi nasional. Negative List ini juga memberikan fleksibilitas kepada pemerintah Tiongkok untuk menyesuaikan regulasi investasi asing sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan ekonomi.

B. Dampak Kebijakan dan Regulasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Kebijakan Tiongkok Terhadap Investasi di Indonesia

Tiongkok telah lama menjadi mitra strategis Indonesia dalam perdagangan dan investasi, terutama sejak diperkenalkannya inisiatif Belt and Road Initiative (BRI) pada tahun 2013. Inisiatif ini menjadi tonggak penting dalam hubungan ekonomi kedua negara, bertujuan untuk memperkuat konektivitas global melalui pembangunan infrastruktur yang masif. Indonesia, dengan posisi geografisnya yang strategis sebagai jalur perdagangan internasional dan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, menjadi salah satu negara prioritas dalam program ambisius Tiongkok tersebut (Malau, 2014).

Melalui BRI, Tiongkok menawarkan berbagai skema pembiayaan inovatif yang dirancang untuk mendukung proyek-proyek besar di Indonesia. Skema ini melibatkan lembaga keuangan seperti Tiongkok Development Bank dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang menyediakan dana dalam bentuk pinjaman berbunga rendah. Dengan pendekatan ini, Tiongkok berperan sebagai pendukung utama pembangunan infrastruktur di Indonesia, baik melalui proyek transportasi seperti kereta cepat Jakarta-Bandung maupun pembangunan pelabuhan, jalan tol, dan kawasan industri (Royhana dan Titi, 2021). Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, misalnya, menjadi simbol kerja sama bilateral yang bertujuan meningkatkan efisiensi transportasi antar kota, sekaligus membuka peluang ekonomi baru di sepanjang jalur tersebut. Selain itu, pelabuhan besar seperti Kuala Tanjung di Sumatera Utara menjadi salah satu contoh bagaimana investasi Tiongkok membantu memperkuat infrastruktur logistik di Indonesia (Elvardi, 2017).

Di sektor energi dan sumber daya alam, Tiongkok juga menunjukkan minat besar pada potensi yang ditawarkan Indonesia. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya seperti nikel, bauksit, dan batubara, Indonesia menjadi target utama investasi Tiongkok dalam pengembangan industri hilirisasi. Hal ini terlihat jelas di kawasan industri seperti Morowali dan Weda Bay, yang telah berkembang menjadi pusat pengolahan nikel terbesar di Asia Tenggara. Investasi ini tidak hanya membantu Indonesia meningkatkan nilai tambah sumber daya alamnya, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan teknologi baterai kendaraan listrik (EV) yang semakin diminati pasar global. Dengan hadirnya pabrik-pabrik pengolahan yang dibiayai oleh Tiongkok, Indonesia dapat mengubah perannya dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi produsen produk bernilai tinggi (Saifulloh, 2020).

Selain sektor infrastruktur dan energi, Tiongkok juga aktif berinvestasi di sektor manufaktur dan teknologi. Di bidang manufaktur, Tiongkok melihat Indonesia sebagai pasar yang besar dan berpotensi untuk produk-produk yang berorientasi ekspor. Industri tekstil dan elektronik, misalnya, menjadi fokus utama investasi karena keduanya memiliki peluang besar di pasar internasional. Sementara itu, di sektor teknologi, perusahaan-perusahaan besar Tiongkok seperti Alibaba dan Tencent telah menanamkan modalnya di startup teknologi Indonesia, termasuk Tokopedia dan Gojek. Langkah ini memperlihatkan bagaimana Tiongkok tidak hanya fokus pada investasi fisik tetapi juga beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital yang pesat di Indonesia (Susanto, 2022).

Strategi kebijakan Tiongkok dalam mendorong investasi di Indonesia dirancang untuk memastikan keberlanjutan hubungan ekonomi bilateral. Melalui diplomasi ekonomi yang proaktif, Tiongkok secara aktif mempromosikan kerja sama dengan pemerintah Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kunjungan pejabat tinggi dari kedua negara sering menghasilkan kesepakatan investasi baru. Selain itu, Tiongkok juga memanfaatkan berbagai forum internasional, seperti ASEAN-Tiongkok Free Trade Agreement (ACFTA), untuk memperkuat posisi investasinya di Indonesia. Aliansi strategis antara perusahaan Tiongkok dan mitra lokal di Indonesia, baik itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan swasta, semakin memperkuat hubungan ekonomi kedua negara. Contohnya adalah kerja sama antara konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-Tiongkok (KCIC) dalam

proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang menjadi model kemitraan strategis antara kedua negara (Siswajanthi *et al.*, 2024).

Namun, meskipun investasi Tiongkok memberikan banyak manfaat, berbagai tantangan tetap ada. Ketergantungan ekonomi pada satu negara dapat mengurangi daya tawar Indonesia dalam hubungan bilateral, sementara dominasi investasi Tiongkok di beberapa sektor strategis menimbulkan kekhawatiran tentang kedaulatan ekonomi. Proyek-proyek besar yang dibiayai oleh Tiongkok juga sering menghadapi kritik terkait kurangnya transparansi, yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain itu, dampak lingkungan dari proyek-proyek tersebut menjadi perhatian serius, terutama di sektor pertambangan dan pembangunan infrastruktur. Eksploitasi sumber daya alam yang masif tanpa memperhatikan keberlanjutan seringkali merusak ekosistem lokal dan menimbulkan protes dari masyarakat.

Kehadiran tenaga kerja asing dalam jumlah besar juga menjadi sumber konflik sosial di beberapa daerah. Dalam proyek-proyek besar, tenaga kerja asal Tiongkok sering kali menduduki posisi teknis atau manajerial, yang memicu ketegangan dengan tenaga kerja lokal. Meskipun pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan ketat tentang penggunaan tenaga kerja asing, persepsi negatif terhadap dominasi tenaga kerja Tiongkok masih menjadi isu yang memerlukan perhatian. Selain itu, akumulasi utang yang besar akibat pinjaman dari Tiongkok juga menjadi risiko yang harus dikelola dengan hati-hati oleh pemerintah Indonesia, terutama jika proyek yang dibiayai tidak memberikan keuntungan yang diharapkan.

Di tengah berbagai peluang dan tantangan, pemerintah Indonesia memainkan peran penting dalam mengelola investasi Tiongkok agar sesuai dengan kepentingan nasional. Melalui kebijakan seperti Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dengan mengurangi hambatan birokrasi dan memberikan kepastian hukum bagi investor. Pada saat yang sama, regulasi lingkungan yang lebih ketat diterapkan untuk memastikan bahwa proyek-proyek besar tidak merusak keberlanjutan ekosistem. Pemerintah juga berusaha mendorong pelibatan UMKM dan komunitas lokal dalam rantai pasok proyek-proyek besar, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata.

Selain itu, pemerintah Indonesia secara aktif melakukan diversifikasi sumber investasi untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara. Langkah ini mencakup menjalin kerja sama dengan negara-negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa, yang juga memiliki minat besar untuk berinvestasi di Indonesia. Melalui pendekatan yang seimbang ini, pemerintah Indonesia berharap dapat memanfaatkan potensi besar dari investasi Tiongkok sambil menjaga kedaulatan ekonomi dan keberlanjutan nasional.

Dampak Terhadap Ekonomi Indonesia

Investasi Tiongkok di Indonesia membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek ekonomi nasional. Sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia, Tiongkok tidak hanya berperan dalam meningkatkan volume perdagangan bilateral tetapi juga menjadi sumber investasi strategis yang berkontribusi pada transformasi sektor-sektor utama ekonomi Indonesia. Dengan meningkatnya keterlibatan Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur, energi, dan sektor industri lainnya, Indonesia mengalami perubahan besar dalam struktur ekonominya, baik dari segi pertumbuhan, lapangan kerja, maupun pengembangan teknologi (Riedho, 2024).

Salah satu dampak paling menonjol dari investasi Tiongkok adalah percepatan pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek besar seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, pembangunan pelabuhan strategis, serta jalan tol yang menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia telah memberikan dorongan besar bagi aktivitas ekonomi. Infrastruktur yang lebih baik menciptakan konektivitas yang lebih efisien antar wilayah, sehingga memperlancar arus barang dan jasa. Sebagai contoh, kereta cepat Jakarta-Bandung tidak hanya diharapkan

memangkas waktu perjalanan tetapi juga mendorong pertumbuhan di wilayah-wilayah sekitarnya melalui pengembangan kawasan ekonomi baru (Rochimasnaini, 2016). Investasi Tiongkok di sektor infrastruktur juga membantu mengurangi ketimpangan regional, karena banyak proyek dilakukan di luar Pulau Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Selain infrastruktur, investasi Tiongkok juga membawa dampak positif pada sektor industri pengolahan. Dengan dukungan dana dan teknologi, Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alamnya secara lebih optimal melalui hilirisasi. Kawasan industri seperti Morowali dan Weda Bay di Sulawesi menjadi contoh konkret bagaimana investasi Tiongkok mendorong industrialisasi di Indonesia. Kawasan ini telah berkembang menjadi pusat pengolahan nikel untuk bahan baku baterai kendaraan listrik, yang merupakan salah satu komoditas penting di era transisi energi global. Proses hilirisasi ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah ekspor Indonesia tetapi juga membuka peluang kerja bagi ribuan tenaga kerja lokal, meskipun diiringi dengan tantangan sosial terkait kehadiran pekerja asing.

Di sektor energi, dampak investasi Tiongkok terlihat dalam pengembangan proyek-proyek pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan geothermal. Langkah ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk meningkatkan porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi nasional. Dengan adanya pendanaan dari Tiongkok, proyek-proyek energi yang sebelumnya sulit terwujud karena keterbatasan dana kini dapat direalisasikan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kapasitas energi nasional, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan sektor industri dan rumah tangga (Mirwanto dan Kementerian Hukum, 2019).

Selain sektor riil, investasi Tiongkok juga membawa dampak signifikan pada sektor keuangan Indonesia. Banyak perusahaan teknologi Tiongkok, seperti Alibaba dan Tencent, yang telah menanamkan modal dalam startup lokal, seperti Tokopedia, Gojek, dan JD.ID. Investasi ini mempercepat perkembangan ekonomi digital di Indonesia, yang kini menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ekosistem digital yang semakin maju tidak hanya mendorong inovasi tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru, terutama bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memanfaatkan platform digital untuk memperluas pasar mereka.

Namun, di balik berbagai dampak positif tersebut, investasi Tiongkok juga menimbulkan sejumlah tantangan yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya ketergantungan Indonesia pada modal asing, terutama dari Tiongkok. Ketergantungan ini membuat Indonesia rentan terhadap perubahan kebijakan ekonomi Tiongkok atau dinamika politik global yang melibatkan negara tersebut. Jika tidak dikelola dengan baik, ketergantungan ini dapat mengurangi kemandirian ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Selain itu, proyek-proyek yang didanai oleh Tiongkok sering kali menimbulkan kekhawatiran terkait dampak lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam yang masif, terutama di sektor pertambangan, dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang sulit dipulihkan. Di Sulawesi, misalnya, proyek pengolahan nikel di kawasan industri Morowali sering menjadi sorotan karena dampaknya terhadap lingkungan sekitar, termasuk pencemaran air dan udara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun investasi Tiongkok mendorong pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan harus tetap menjadi perhatian utama.

Konflik sosial juga menjadi salah satu dampak dari investasi Tiongkok, terutama terkait dengan tenaga kerja. Kehadiran pekerja asing dalam jumlah besar sering kali menimbulkan ketegangan dengan masyarakat lokal, yang merasa tersaingi dalam pasar tenaga kerja. Meskipun pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi ketat tentang penggunaan tenaga kerja asing, isu ini tetap menjadi sumber protes di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dalam memastikan bahwa masyarakat lokal dapat merasakan manfaat langsung dari investasi asing.

Di sektor keuangan, masuknya investasi Tiongkok ke startup teknologi di Indonesia juga memiliki risiko tersendiri. Meskipun mempercepat inovasi dan transformasi digital,

ketergantungan pada modal asing dalam pengembangan teknologi dapat menimbulkan kekhawatiran tentang kedaulatan data dan kontrol atas aset strategis. Jika tidak diatur dengan baik, dominasi modal asing dalam sektor teknologi dapat mengurangi daya saing perusahaan lokal dan menciptakan ketidakseimbangan dalam ekosistem digital (Napitulpulu, 2017).

Di sisi lain, pemerintah Indonesia memainkan peran penting dalam memitigasi dampak negatif dan memaksimalkan manfaat dari investasi Tiongkok. Melalui kebijakan yang proaktif, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah berusaha menciptakan iklim investasi yang kondusif tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Regulasi ini dirancang untuk mempercepat proses perizinan, meningkatkan transparansi, dan memberikan kepastian hukum bagi investor. Selain itu, pemerintah juga mendorong pelibatan UMKM dan komunitas lokal dalam proyek-proyek besar yang melibatkan Tiongkok, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh lebih banyak pihak (Karmilawaty, 2024).

Dalam jangka panjang, investasi Tiongkok di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, hal ini hanya dapat terwujud jika pemerintah dan masyarakat Indonesia mampu mengelola tantangan yang ada dengan bijaksana. Dengan memastikan bahwa investasi asing, termasuk dari Tiongkok, sejalan dengan agenda pembangunan nasional, Indonesia dapat memanfaatkan peluang ini untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara.

Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia

Kebijakan pemerintah Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memanfaatkan peluang dari investasi asing, termasuk dari Tiongkok, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Seiring dengan semakin meningkatnya arus modal dari Tiongkok, pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai kebijakan strategis untuk memastikan investasi tersebut sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, meningkatkan daya saing ekonomi, serta memitigasi dampak negatif yang mungkin timbul.

Salah satu kebijakan utama yang diambil pemerintah Indonesia adalah penyederhanaan regulasi dan birokrasi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Undang-Undang Cipta Kerja, yang disahkan pada tahun 2020, menjadi salah satu langkah besar dalam mengatasi hambatan investasi. Undang-undang ini memperkenalkan berbagai reformasi, seperti penyederhanaan proses perizinan, penghapusan aturan yang tumpang tindih, dan pemberian insentif bagi investor asing yang berkontribusi pada transfer teknologi atau pengembangan sumber daya manusia lokal. Dengan regulasi ini, pemerintah berharap dapat menarik lebih banyak investasi asing langsung (FDI), termasuk dari Tiongkok, serta meningkatkan daya saing Indonesia dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Selain reformasi regulasi, pemerintah juga telah menetapkan prioritas pembangunan yang sejalan dengan kebutuhan investor asing. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), fokus utama diberikan pada pengembangan infrastruktur, hilirisasi industri, dan transisi energi yang berkelanjutan. Kebijakan ini secara langsung mendorong masuknya investasi dari Tiongkok, yang selama ini telah menunjukkan minat besar pada proyek infrastruktur dan sektor energi. Proyek strategis nasional, seperti pembangunan pelabuhan, kawasan industri, dan pembangkit listrik, dirancang untuk tidak hanya menarik investasi tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui peningkatan efisiensi logistik dan penguatan kapasitas produksi (Lestari, 2021).

Dalam hal hubungan bilateral, pemerintah Indonesia secara aktif memanfaatkan diplomasi ekonomi untuk memperkuat kerja sama dengan Tiongkok. Melalui forum bilateral, seperti Komite Ekonomi dan Perdagangan Bersama Indonesia-Tiongkok, serta partisipasi dalam inisiatif multilateral seperti Belt and Road Initiative (BRI), pemerintah berupaya memastikan bahwa proyek-proyek investasi membawa manfaat maksimal bagi Indonesia. Salah satu bentuk diplomasi ini adalah mendorong kemitraan strategis antara perusahaan

Tiongkok dan entitas lokal, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kemitraan ini dirancang untuk meningkatkan alih teknologi dan pengembangan kapasitas lokal, sekaligus memastikan bahwa investasi asing tidak sepenuhnya didominasi oleh pihak luar.

Di sektor energi, kebijakan pemerintah berfokus pada pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) yang sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi karbon. Pemerintah telah memberikan berbagai insentif, seperti pengurangan pajak dan kemudahan perizinan, bagi proyek-proyek EBT yang melibatkan investor asing. Dengan meningkatnya investasi Tiongkok dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan angin, kebijakan ini menjadi katalis penting dalam mempercepat transisi energi di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga mendorong pembentukan kerangka regulasi yang memastikan keberlanjutan proyek-proyek energi, termasuk dalam hal pengelolaan lingkungan dan keterlibatan masyarakat lokal.

Kebijakan terkait hilirisasi juga menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan bahwa investasi asing, terutama di sektor pertambangan, memberikan nilai tambah yang maksimal bagi perekonomian nasional. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan larangan ekspor bijih mentah, seperti nikel dan bauksit, untuk mendorong pembangunan fasilitas pengolahan di dalam negeri. Dengan adanya kebijakan ini, banyak perusahaan Tiongkok yang tertarik untuk berinvestasi di kawasan industri pengolahan mineral, seperti Morowali dan Weda Bay. Proyek-proyek ini tidak hanya meningkatkan pendapatan ekspor Indonesia tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pengembangan teknologi dalam negeri.

Namun, keberhasilan kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengelola investasi Tiongkok juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah memastikan bahwa proyek-proyek investasi tidak hanya menguntungkan investor asing tetapi juga memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat lokal. Untuk itu, pemerintah telah mengembangkan kebijakan yang mendorong keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok proyek besar. Langkah ini bertujuan untuk memperluas dampak ekonomi dari investasi asing sehingga dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Dalam konteks keberlanjutan, pemerintah juga mengeluarkan regulasi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai oleh Tiongkok tidak merusak lingkungan. Hal ini meliputi pengawasan yang lebih ketat terhadap dampak lingkungan dari proyek infrastruktur dan pertambangan, serta penerapan sanksi bagi perusahaan yang melanggar aturan. Kebijakan ini penting untuk menjadi keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekologis, terutama mengingat Indonesia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga berusaha memitigasi risiko ketergantungan terhadap satu negara investor. Diversifikasi sumber investasi menjadi salah satu strategi utama untuk mengurangi risiko tersebut. Melalui upaya diplomasi ekonomi dengan negara-negara lain, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa, pemerintah menciptakan peluang baru untuk menarik investasi di sektor-sektor strategis. Diversifikasi ini tidak hanya memperkuat posisi tawar Indonesia tetapi juga mendorong kompetisi sehat di antara para investor, sehingga menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

KESIMPULAN

Setidaknya terdapat dua kesimpulan utama dari pembahasan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

Pengaruh Kebijakan dan Sistem Hukum Tiongkok terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang pesat merupakan hasil dari reformasi kebijakan yang dimulai pada era Deng Xiaoping, termasuk Kebijakan Pintu Terbuka dan berbagai inisiatif modernisasi. Sistem hukum yang mendukung stabilitas investasi dan pemberian insentif kepada investor telah memperkuat daya tarik Tiongkok sebagai destinasi ekonomi

global. Langkah-langkah ini mengubah Tiongkok dari ekonomi tertutup menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia.

Dampak Ekspansi dan Kebijakan Ekonomi Tiongkok di Indonesia

Ekspansi ekonomi Tiongkok melalui Belt and Road Initiative (BRI) memberikan dampak positif bagi pembangunan infrastruktur dan hilirisasi sumber daya alam di Indonesia. Namun, tantangan muncul dalam bentuk ketergantungan ekonomi, isu lingkungan, dan konflik sosial terkait kehadiran tenaga kerja asing. Pemerintah Indonesia perlu memitigasi risiko ini untuk menjaga keberlanjutan dan kedaulatan ekonomi nasional.

REFERENSI

- Alunaza *et al.* "The Strategic Cooperation between Indonesia and Tiongkok Under Jokowi's Foreign Policy towards Global Maritime Diplomacy". *Jurnal Hubungan Internasional Indonesia*, 1 (1), 2018.
- Bambang, C. *Strategi Cina Merebut Status Super Power*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Dahlman, Carl J; Aubert, Jean-Eric. "Tiongkok and the Knowledge Economy: Seizing the 21st Century. WBI Development Studies. World Bank Publications". Institute of Education Sciences. Diakses tanggal 8 Desember 2024.
- Elvardi, J. "Perjanjian Internasional Tentang Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean Dan Tiongkok Dalam Hukum Nasional Indonesia." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 47–67. <http://journal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/1135>.
- Fadillah, Dani dan Kumajaya, *Lompatan Strategis Cina dalam Komunikasi Global*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2017.
- Ibnu Khaldun, Riady, Ratna Sari, dan Andi Ismira. "Retaliasi Tiongkok Terhadap Amerika Serikat Dalam Konteks Perang Dagang." *Hasanuddin Journal of International Affairs* 3, no. 2 (August 3, 2023): 68–81.
- Lestari, V. P. "Ringkasan Permasalahan Dan Tantangan Program Peningkatan Kontribusi Energi Baru Dan Terbarukan Dalam Bauran Energi Nasional." *Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara* 22 (2021): 11.
- Malau, Masnur Tiurmaida. "Aspek Hukum Peraturan Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghadapi Liberalisasi Ekonomi Regional: Masyarakat Ekonomi Asean 2015." *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 2 (2014): 163. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i2.38>.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005.
- Mirwanto, Tony, and Kementerian Hukum. "Alternatif Pendukung Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Bagi Wisatawan Asal Tiongkok Di Indonesia." *Ilmiah Kajian Keimigrasian* 2, no. 2 (2019): 119–32.
- Musfiroh & Alunaza. "Strategi Engagement Tiongkok terhadap New Zealand dan Australia Melalui Kerja Sama Bantuan Trilateral di Asia Pasifik". *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 16 (2), 2020.
- Napitulpulu, B. R. "Pengaruh Tiongkok Terhadap Kebijakan Ekonomi Politik Zimbabwe Dalam Menerapkan Yuan Sebagai Mata Uang Resmi." *Journal of Chemical Information and Modeling* 4, no. 9 (2017): 1689–99.
- Karmilawaty. "Agresivitas Kebijakan Luar Negeri Tiongkok Dalam Sengketa Wilayah Dengan Filipina Di Pulau Thitu." *Journal of Global Studies* 2, no. 2 (2024).
- Riedho, M. R. Z. "Strategi Tiongkok Dalam Memanfaatkan Momentum Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Oleh Pemerintah Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 20, no. 1 (2024): 74–95. <https://doi.org/10.26593/jihi.v20i1.7156.74-95>.
- Risya, A. C. "Analisis Kebijakan Tarif Maupun Non Tarif Amerika Serikat Terhadap Tiongkok Dalam Perang Dagang." *Journal of International Relations* 6, no. 71 (2020):

- 47–55.
<https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798>
<https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002>
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049>
<http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391>
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>
- Rochimasnaini, A. “Negara Dan Kebijakan Publik (Studi Peran Negara Terhadap Kebijakan Investasi Pembangunan Infrastruktur Kereta Cepat Dalam Perspektif Ekonomi Politik).” Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2016.
- Royhana, Maulidia, dan T. D. Warninda. “Pengaruh Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi Amerika Serikat, Tiongkok, Dan Jepang Terhadap Jakarta Islamic Index.” *Jurnal Fokus Manajemen Bisnis* 11, no. 1 (2021): 95. <https://doi.org/10.12928/fokus.v11i1.3735>.
- Saifulloh, Moh. Roziq. “Kebijakan Proteksionisme Indonesia Guna Menstabilkan Iklim Investasi Nasional Dan Mengkapitalisasi Kondisi Perang Dagang Amerika Serikat – Tiongkok.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 1 (2020): 51–63. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i1.193>.
- Siswajanthi, Farahdinny, K. A. Shiva, Nashwa Salsabila, Salsabila Afifany Susanta Putry, Silvia Maharani Iskandar Putri, Program Studi Ilmu Hukum, and Universitas Pakuan Bogor. “Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Indonesia.” *Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Indonesia* 8 (2024): 5–8.
- Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 19, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Suharman, Y. dan S. Pramono, “Strategi Kebangkitan Ekonomi Tiongkok dan Pendekatan *Long Cycle* Transisi Kekuasaan Politik Dunia”, *SPEKTRUM*, Volume 18, No. 1, 202
- Susanto, D. “Belt Road Initiative (BRI) Dan Kerangka Kebijakan Hukum Ekonomi Indonesia.” *JUEB: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 3 (2022): 82–89. <https://doi.org/10.55784/jueb.v1i3.272>.
- Wibawa, A. dan P. T. Arisanto, “Upaya Tiongkok dalam Mengatasi Ketimpangan Pembangunan Antardaerah pada Masa Kepemimpinan Jiang Zemin dan Hu Jintao”, *Nation State: Journal of International Studies*, Vol. 2, No. 2 (2019), hlm. 113-114.
- Rivasi, A. N. A. “Relasi Negara dan Bisnis Dalam Kebijakan Ekonomi Luar Negeri China: *The Belt And Road Initiative Di Asia Tenggara*.” Tesis Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, 2018.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. “Diplomasi Indonesia: Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik”, 2014. Tersedia pada <https://www.kemlu.go.id/Buku/Buku%20Diplomasi%20Indonesia%202014.pdf>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2024.
- Sumadinata Saphira, K., dkk. “Kerja Sama Pertanian Indonesia dengan China dalam Kerangka AFCTA.” *Padjadjaran Journal of International Relations*. Vol. 4. (2022).
- Mahdi, N. Trade Creation dan Trade Diversion Atas Pemberlakuan ACFTA Terhadap Perdagangan Hortikultura Indonesia.” *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*. Vol. 15. (2021).
- Hasibuan, R. Mansor dan S. I. Sinambela. “Kerjasama Pertanian Indonesia Dengan China Dalam Kerangka ACFTA.” *Journal of Global Perspective*. Vol. 2. No. 1. (2024).
- Badan Koordinasi Penanaman Modal, “Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor Periode Januari-Maret 2019”, 2019. Tersedia pada https://www.bkpm.go.id/images/uploads/investasi_indonesia/file/Perkembangan_Realisasi_PMA_Berdasarkan_Sektor_TW_I_2019.pdf. Diakses pada tanggal 9 Desember 2024.